

Determinan Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Ayu Wandirah^{1,*}, Joko Setyono²
ayuwdrh@gmail.com^{1,*}, joko.setyono@uin-suka.ac.id²
IAIN Parepare Sulawesi Selatan¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²

ABSTRACT

This paper examines how government expenditure affects the education and health sectors, economic growth, and labor force on HDI in 13 provinces in the Eastern Region of Indonesia (KTI) for 2015-2022. Using panel data regression, this paper studies whether the human development index correlates to government expenditure on the education and health sectors, economic growth, and the labor force in the province of KTI. The study's findings revealed that all exogenous variables in this paper were important factors that influenced human development in KTI during the 8-year observation period. This shows that the government has succeeded in improving the welfare of its people, which is reflected in the value of HDI in each KTI province which has increased in recent years. However, the government still has to continue striving for human development to improve its people's quality of life and standard of living.

Keywords: Education, Economic Growth, Government Expenditure, Health, Labor Force, Human Development Index.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta angkatan kerja pada IPM di total 13 provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2015-2022. Dengan menggunakan regresi data panel, artikel ini mempelajari apakah indeks pembangunan manusia menunjukkan korelasi terhadap pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta angkatan kerja di provinsi KTI. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa semua variabel eksogen dalam artikel ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembangunan manusia di KTI selama 8 tahun masa pengamatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang tercermin pada nilai IPM di masing-masing provinsi KTI yang mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir, meski demikian pemerintah masih harus terus mengupayakan pembangunan manusia agar dapat meningkatkan kualitas hidup serta taraf hidup masyarakatnya.

Kata kunci: Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi.

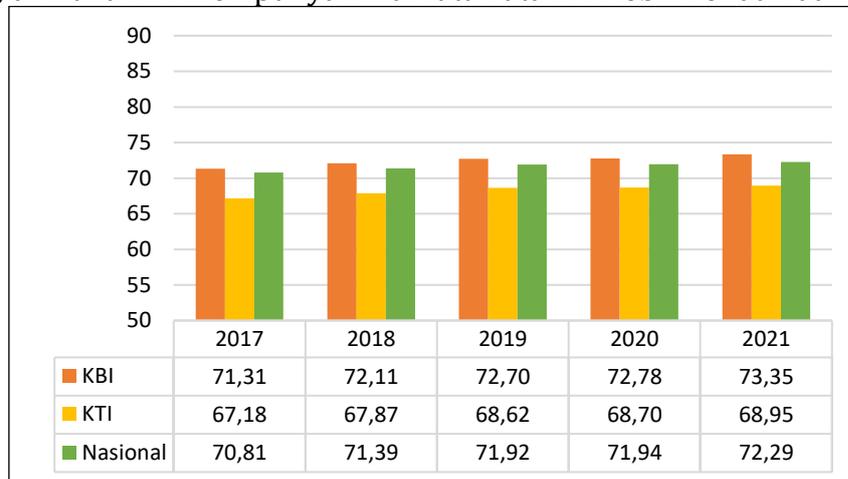
PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan menyediakan berbagai kebutuhan dasar (Todaro & Smith, 2015). Untuk itu, setiap negara terus mengupayakan pembangunan di wilayahnya, serta untuk mengupayakan kesejahteraan dan perbaikan yang berkesinambungan, tidak hanya bagi bangsa dan daerahnya tetapi juga bagi masyarakatnya (Khairina & Wijaya, 2023), sehingga dapat diwujudkan pembangunan nasional yang merata. Indeks pembangunan manusia atau IPM berfungsi sebagai indikator yang krusial untuk menilai kemajuan pembangunan nasional maupun daerah, dengan memberikan gambaran yang lebih

*Corresponding Author

komprehensif tentang kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan pertumbuhan ekonomi (Jin & Jakovljevic, 2023). IPM merupakan suatu konsep yang menjelaskan kondisi setiap penduduk berdasarkan hasil capaian pembangunan manusia, dengan mempertimbangkan 3 aspek fundamental, yakni kesehatan, pendidikan, serta pendapatan (Wijaya *et al.*, 2021; Zhang & Danish, 2019). Di mana, pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera (Hasbi *et al.*, 2023).

Indonesia memiliki 38 Provinsi yang secara geografis terbagi menjadi dua kawasan yakni barat dan timur, 21 provinsi masuk dalam Kawasan Barat Indonesia atau KBI dan 17 provinsi lainnya masuk dalam Kawasan Timur Indonesia atau KTI. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b), Indonesia memiliki nilai IPM tergolong tinggi. Terjadi peningkatan yang konsisten dalam IPM Indonesia selama periode 2017-2021, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. dan berada pada angka 72.29 di tahun 2021. Sedangkan, masih terdapat perbedaan yang besar antara IPM di KBI dengan KTI, di mana KTI mempunyai nilai rata-rata IPM lebih rendah daripada KBI.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1

Perbandingan Nilai Rata-rata IPM antara KBI, KTI dan Nasional

Gambar 1 memperlihatkan perbandingan nilai rata-rata IPM antara KBI, KTI dan Nasional. Rata-rata nilai IPM (2017-2022) KBI sebesar 72.45, Nasional sebesar 71.67, dan KTI sebesar 68.26. Dari 17 provinsi yang masuk ke dalam KTI hanya terdapat 3 provinsi yang memiliki nilai IPM tergolong tinggi yakni provinsi Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, selebihnya masih tergolong nilai IPM rendah. Artinya mutu sumber daya manusia atau SDM KTI masih tertinggal jauh dari KBI dan Nasional. Menandakan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia. Untuk itu, KTI perlu mengejar ketertinggalan dan mendapatkan prioritas dari KBI dari sisi pembangunan manusianya. Sehingga dapat diwujudkan pertumbuhan yang mandiri dan pembangunan nasional dan daerah yang merata.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami dinamika pembangunan manusia adalah *human capital theory*. Schultz (1961) mengatakan bahwa semua kemampuan manusia yang bersifat bawaan atau diperoleh, atribut dan dapat ditingkatkan dengan investasi yang tepat akan menjadi modal manusia. Manusia menjadi lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Abdeldayem *et al.*, 2022). Karena angkatan kerja yang sehat dan berpendidikan dapat

meningkatkan produktivitas mereka (Grossman, 2000). Peningkatan produktivitas ini kemudian mengarah pada peningkatan pendapatan dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Peningkatan pada kualitas SDM merupakan salah tujuan dasar pembangunan (Todaro & Smith, 2015).

Tercapainya tujuan pembangunan daerah sangat bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di masing-masing daerah melalui pengeluaran pemerintah untuk berbagai sektor termasuk di dalamnya pendidikan maupun kesehatan (Nurvita *et al.*, 2022). Pemenuhan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi suatu investasi sumber daya manusia, dan merupakan kekuatan pendorong terbesar bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional (Lange *et al.*, 2018). Meningkatkan kualitas SDM tidak lepas dari peran penting akses pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (Linhartová, 2020). Pendidikan berperan penting dalam membangun kapasitas suatu negara terutama negara berkembang dalam memanfaatkan teknologi modern dan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang mandiri (Todaro & Smith, 2015).

Tujuan pembangunan manusia juga dapat dicapai melalui peningkatan kesehatan masyarakatnya (Hasbi *et al.*, 2023). Kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi peningkatan produktivitas, karena individu yang sehat dapat fokus belajar dan menyerap ilmu dengan lebih optimal (Todaro & Smith, 2015). Aksesibilitas layanan kesehatan yang mudah dijangkau menunjang peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Fauziana dan Ratnasari (2023) serta Linhartová (2020) dalam studinya menyebutkan bahwa investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi penting untuk pembangunan manusia di daerahnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Nurvita *et al.* (2022) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif dan optimal dalam alokasi dana untuk mendorong peningkatan SDM. Pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan landasan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta merupakan salah satu penentu utama kinerja perekonomian baik pada tingkat mikro maupun makro (Linhartová, 2020). Investasi pada bidang pendidikan serta kesehatan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tapi juga berkontribusi secara langsung pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, sehingga ini merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015). Namun hal ini bertentangan dengan temuan Ningrum *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan tidak berdampak pada pembangunan manusia di Indonesia selama masa pengamatan.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan manusia di suatu negara atau daerah (Nurlina *et al.*, 2023; Wahyudi *et al.*, 2023). Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan (Hasbi *et al.*, 2023). Produk domestik regional bruto atau sering disingkat PDRB adalah salah satu dari banyaknya indikator untuk menilai kinerja ekonomi di tingkat daerah, peningkatan pada pendapatan daerah sangat bergantung pada kualitas manusianya. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas hidup manusia yang baik, sehingga mereka lebih produktif dan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Nurvita *et al.*, 2022). Daerah dengan pendapatan yang tinggi umumnya memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada daerah dengan pendapatan yang lebih rendah. Hal tersebut akan

mendorong pemerataan pendapatan dan akan meningkatkan IPM (Hasbi *et al.*, 2023). Tenaga kerja yang berkualitas dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Nurlina *et al.*, 2023). Hal ini konsisten dengan temuan Wahyudi *et al.* (2023) serta Hasbi *et al.* (2023) mengungkapkan bahwasanya laju pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan pada IPM. Tetapi berbeda dengan temuan Ningrum *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak dapat menjamin bahwa IPM juga akan mencapai tingkat yang sama.

Sementara itu, angkatan kerja merupakan aspek penting dalam perekonomian, di mana kualitasnya menentukan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi (Wijaya *et al.*, 2021). Rendahnya kualitas SDM akan menyebabkan produktivitas kerja yang juga rendah, dan akhirnya berujung pada pendapatan rendah dan tingginya angka kemiskinan (Raynaldo, 2022). Karena angkatan kerja merupakan faktor kunci dalam proses produksi pada suatu daerah maka kebijakan yang tepat harus diterapkan yang fokus pada pengembangan angkatan kerja dan peningkatan IPM dalam mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Wijaya *et al.* (2021) dalam studinya mengungkapkan bahwa ketersediaan angkatan kerja merupakan faktor yang krusial dalam pembangunan manusia suatu daerah. Temuan ini diperkuat oleh temuan Fauziana dan Ratnasari (2023), yang mengungkapkan bahwa keberadaan angkatan kerja yang besar merupakan salah satu elemen yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara atau daerah, yang diukur melalui IPM. Choudhry dan Elhorst (2018) mengungkapkan bahwa angkatan kerja dapat berpengaruh atau tidak pada IPM tergantung pada indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan utama dalam studi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompleksitas faktor yang mempengaruhi IPM di Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya peran penting sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan angkatan kerja. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai IPM yang tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan ketersediaan angkatan kerja berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pemerintah KTI dalam membantu merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional yang merata.

KAJIAN LITERATUR

Teori Human Capital

Schultz (1961) mengatakan bahwa semua kemampuan manusia yang bersifat bawaan atau diperoleh, atribut dan dapat ditingkatkan dengan investasi yang tepat akan menjadi modal manusia. Menurut *World Bank* (2021) modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dikumpulkan manusia sepanjang hidup mereka. Manusia menjadi lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Abdeldayem *et al.*, 2022). Tujuan investasi pada modal manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya tanggap insentif ekonomi dan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan (Schultz, 1961). Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja (Grossman, 2000).

Teori *Endogenous Growth*

Teori *Endogenous Growth* adalah konsep yang dikembangkan oleh Paul Romer (1986), teori ini menyoroti hubungan pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor internal perekonomian (pengetahuan, inovasi, dan modal manusia). Teori *Endogenous growth model* menyatakan bahwa modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi (Mankiw, 2007). Teori ini menekankan bahwa modal manusia memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi positif pada IPM. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan IPM melalui peningkatan pendapatan, peningkatan pada akses layanan publik serta penciptaan lapangan kerja (Wahyudi et al., 2023).

Indeks Pembangunan Manusia

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah alat ukur untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi suatu wilayah, indeks ini menggabungkan perhitungan tingkat pendidikan kesehatan, serta pendapatan per kapita (Todaro & Smith, 2015). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) IPM bertujuan untuk meringkas pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia. Nilai IPM di kategorikan dari skala 0 (nol) sampai 1 (satu), semakin mendekati angka satu suatu IPM, semakin tinggi tingkat pembangunan manusianya, dan sebaliknya semakin mendekati angka nol, semakin rendah pembangunan manusianya (Todaro & Smith, 2015). Perhitungan IPM berlandaskan pada tiga tujuan pembangunan yakni umur panjang (dihitung dari angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (dinilai dari rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah), dan standar hidup (dinilai dari pendapatan per kapita) (Jajang et al., 2021; Todaro & Smith, 2015).

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

Pembangunan manusia sangat penting bagi pemerintah, pemerintah bertanggung jawab mendanai pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakatnya (Khairina & Wijaya, 2023). Alokasi dana pemerintah untuk layanan publik merupakan salah satu langka pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai layanan publik (Hasibuan & Syahbudi, 2022). Pengeluaran pemerintah dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan menggunakannya sebagai alat kebijakan fiskal.

Pendidikan mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia dan merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan (Nurvita et al., 2022). Untuk itu, sektor pendidikan suatu negara menjadi landasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan merupakan faktor fundamental dalam membentuk kemampuan manusia yang berkualitas sehingga memungkinkan terlaksananya komitmen finansial terhadap pendidikan melalui kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas (Hasbi et al., 2023). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan adalah alokasi dana yang telah disediakan dan disiapkan pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di sektor pendidikan (Hasibuan & Syahbudi, 2022). Akses dan kualitas pendidikan yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, investasi pemerintah di sektor pendidikan merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas (Hasbi et al., 2023).

Teori *human capital* menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, yang pada gilirannya

meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja (Grossman, 2000). Peningkatan produktivitas ini kemudian mengarah pada peningkatan pendapatan dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Besar kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berdampak pada lama sekolah sehingga IPM akan meningkat (Nurvita *et al.*, 2022). Studi Linhartová (2020) dan Khairina & Wijaya (2023) menemukan bahwa investasi pemerintah pada fungsi pendidikan dapat memberikan kontribusi yang substansial pada pembangunan manusia yang mendorong peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut.

H1: Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Salah satu tujuan pembangunan dapat dicapai melalui peningkatan kesehatan masyarakatnya. Konsep kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi di mana seseorang memiliki keseimbangan dan keharmonisan dalam aspek fisik, mental, dan sosial (Todaro & Smith, 2015). Kesehatan memiliki potensi untuk meningkatkan produktif individu yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Aksesibilitas layanan kesehatan yang mudah dijangkau dapat menunjang peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak positif pada kualitas SDM. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan sangat penting terutama bagi masyarakat miskin di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang baik masyarakatnya. Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan merupakan nilai pengeluaran pemerintah dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan fisik masyarakat pada sisi kesehatannya (Hasbi *et al.*, 2023; Nurvita *et al.*, 2022). Negara bertanggung jawab mewujudkan perbaikan kondisi manusia melalui kesempatan dan sumber daya kesehatan yang berkualitas.

Teori *human capital* menyatakan bahwa investasi dalam kesehatan meningkatkan kesehatan dan umur panjang individu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja (Grossman, 2000). Peningkatan produktivitas ini kemudian mengarah pada peningkatan pendapatan dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Besar kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan berdampak pada angka harapan hidup sehingga IPM akan meningkat (Nurvita *et al.*, 2022). Studi Fauziana dan Ratnasari (2023) dan Linhartová (2020) menemukan bahwa pengeluaran disektor kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan manusia di daerah tersebut, alokasi dana untuk sektor kesehatan dapat mendorong peningkatan pada SDM-nya.

H2: Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dinilai dengan melihat dan meninjau pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi ekonomi suatu wilayah secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu tertentu (Todaro & Smith, 2015). Dalam bukunya Todaro dan Smith (2015) menyebutkan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi di antaranya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Produk domestik regional bruto atau sering disingkat PDRB adalah salah satu dari banyaknya indikator untuk menilai kinerja ekonomi di tingkat

daerah. PDRB mencerminkan semua nilai pasar produk akhir yang dihasilkan suatu ekonomi dalam kurang waktu tertentu (Mankiw, 2007; Todaro & Smith, 2015).

Dalam teori *endogenous growth* model menyatakan bahwa modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi (Mankiw, 2007). Teori ini menekankan bahwa modal manusia memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi positif pada IPM. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan IPM melalui peningkatan pendapatan, peningkatan pada akses layanan publik serta penciptaan lapangan kerja. Studi Wijaya *et al.* (2021) membuktikan adanya keterkaitan yang saling memperkuat diantara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Hasil ini diperkuat oleh studi Wahyudi *et.al* (2023) dan Hasbi *et al.* (2023), mereka menemukan bahwa salah satu elemen yang bisa mempengaruhi pencapaian IPM yang lebih tinggi di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil.

H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

Angkatan Kerja

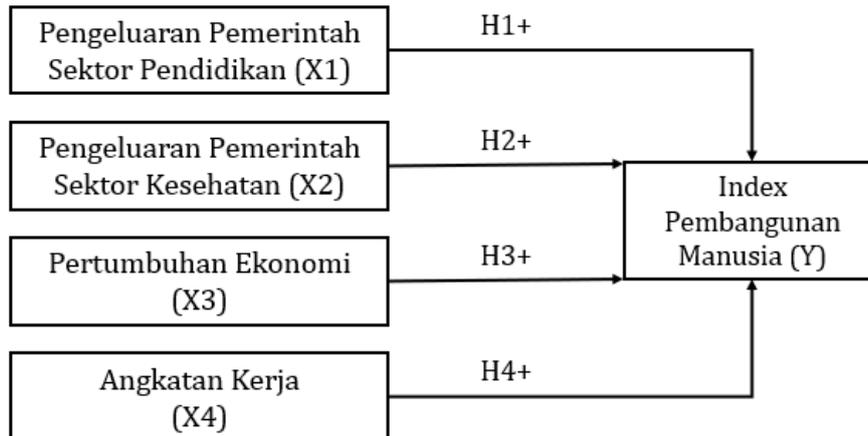
World Bank mendefinisikan angkatan kerja sebagai kelompok penduduk umur 15 tahun atau lebih dan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa selama kurung waktu tertentu. Badan Pusat Statistik melalui publikasinya mengklasifikasikan angkatan kerja menjadi penduduk usia 15 tahun atau lebih yang aktif secara ekonomi, klasifikasi ini mencakup tiga kategori: penduduk bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tapi untuk sementara tidak bekerja ataupun penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) (BPS, 2023a). Jumlah angkatan kerja cenderung bervariasi sepanjang tahun seiring dengan masuk dan keluarnya pekerja musiman.

Individu diklasifikasikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang bekerja ketika mereka telah menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan, dengan durasi minimum satu jam bekerja secara berkelanjutan selama seminggu sebelum waktu pengukuran (Raynaldo, 2022). Semakin banyak angkatan kerja di suatu daerah yang siap bekerja, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut melalui indeks pembangunan manusia (Fauziana & Ratnasari, 2023). Wijaya *et al.* (2021) menyebutkan bahwa usia produktif (15 tahun ke atas) dianggap sebagai kriteria ideal untuk memulai pekerjaan dasar.

Dalam teori penawaran dan permintaan, indeks pembangunan manusia dapat dilihat sebagai faktor yang mendorong permintaan tenaga, semakin tinggi IPM, maka semakin banyak individu atau orang yang aktif dalam angkatan kerja serta aktif dalam mencari pekerjaan (Wijaya *et al.*, 2021). Daerah dengan angkatan kerja yang besar dan memiliki keterampilan cenderung memiliki Indeks pembangunan manusia yang tinggi, karena angkatan kerja yang sehat dan terampil akan lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang sakit dan tidak memiliki keterampilan. Wijaya *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi aktif angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi memiliki dampak positif terhadap pencapaian IPM yang tinggi. Hasil studi ini diperkuat oleh studi Fauziana dan Ratnasari (2023) yang menemukan hal serupa, di mana angkatan kerja yang produktif dan terampil berkontribusi secara signifikan pada peningkatan IPM di daerahnya.

H4: Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia

Berdasar pada teori, tinjauan literatur, serta pengembangan hipotesis yang telah diuraikan, gambaran kerangka konseptual dalam artikel ini adalah berikut ini:



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 2
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Dalam artikel ini melibatkan dua tipe variabel, variabel endogen yang diwakili oleh indeks pembangunan manusia dan variabel eksogen yang mencakup pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB, dan angkatan kerja.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator | Sumber |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Indeks Pembangunan Manusia (Y) | Alat ukur untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi suatu wilayah, indeks ini menggabungkan perhitungan tingkat pendidikan kesehatan, dan pendapatan per kapita (Jajang <i>et al.</i> , 2021; Todaro & Smith, 2015) | Indeks Pembangunan Manusia (%) | BPS |
| Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) | Alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan di sektor pendidikan (Hasibuan & Syahbudi, 2022) | Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp) | Kemenkeu |
| Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) | Alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan di sektor kesehatan (Hasbi <i>et al.</i> , 2023; Nurvita <i>et al.</i> , 2022) | Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rp) | Kemenkeu |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| Pertumbuhan Ekonomi (X3) | Semua nilai pasar produk akhir yang dihasilkan suatu ekonomi dalam kurang waktu tertentu (Mankiw, 2007; Todaro & Smith, 2015) | $= \frac{g(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}}$ | BPS |
| Angkatan Kerja (X4) sumbernya | Individu yang berumur 15 tahun atau lebih yang aktif secara ekonomi meliputi: pekerja, pencari kerja, atau yang belum bekerja (BPS, 2023a; Fauziana & Ratnasari, 2023) | Total Angkatan Kerja | BPS |

Sumber: Data diolah, 2024

Data, Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Artikel ini memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik serta Kementerian Keuangan. Data tersebut terdiri dari data IPM, alokasi dana pemerintah pada fungsi pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta total angkatan kerja kawasan timur Indonesia yang dikumpulkan untuk periode 2015-2022. Artikel ini melibatkan 17 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai populasi (Khairina & Wijaya, 2023). Sampel diambil secara selektif dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dipergunakan ialah provinsi yang berada di Kawasan Indonesia Timur (KTI), dan memiliki publikasi data yang lengkap dari tahun 2015-2022. Dengan menggunakan kriteria tersebut, 13 provinsi dipilih sebagai sampel, yaitu provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut), Maluku, Papua Barat (Pabar) dan Papua. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis data dengan bantuan program EViews 12.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Menampilkan hasil olah data berbentuk angka yang memuat nilai minimum, maksimum, mean dan standard deviation. Berikut ini hasil olah data dengan menggunakan program Eviwes 12:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

| | X1 | X2 | X3 | X4 | Y |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| Mean | 1,150,000,000,000 | 393,000,000,000 | 1,150,000,000,000 | 159369 | 67.9159 |
| Maximum | 4,110,000,000,000 | 1,050,000,000,000 | 4,110,000,000,000 | 455937 | 76.4400 |
| Minimum | 3,080,000,000 | 4,230,000,000 | 3,080,000,000 | 413635 | 57.2500 |
| Std. Dev. | 942,000,000,000 | 250,000,000,000 | 942,000,000,000 | 106960 | 4.02639 |
| Observations | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2 menampilkan ringkasan gambaran statistik berdasarkan estimasi regresi data panel dengan total 104 observasi. Nilai *mean* variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan angkatan kerja berada di antara nilai maksimum dan minimum data maka variabel eksogen dalam artikel ini terbebas dari *outlier*.

Uji Pemilihan Model

Dalam regresi data panel terdapat tiga model estimasi yakni diantaranya *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM) (Widarjono, 2018). Untuk menentukan regresi data panel yang paling cocok maka dilakukan tiga uji yakni *Chow*, *Hausman* dan *Lagrange Multiplier* (LM) (Napitupulu et al., 2021; Widarjono, 2018).

Uji *Chow* dilaksanakan untuk menentukan apakah FEM atau CEM yang cocok sebagai model estimasi, dengan melihat nilai *Cross-Section F*. Ketika nilai *Prob. Cross-Section F* < 0.05 maka model terpilih ialah FEM, jika sebaliknya maka CEM yang terpilih.

Tabel 3
Hasil Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f | Prob. |
|-----------------|------------|---------|---------------|
| Cross-section F | 112.377876 | (12.87) | 0.0000 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 3 dapat dilihat bahwasanya nilai *Prob. Cross-Section F* ialah $0.0000 < 0.05$ yang merupakan batas kritis untuk pengujian. Untuk itu, FEM yang terpilih. kemudian dilanjutkan dengan pengujian kedua yakni uji *Hausman*.

Uji *Hausman* dilaksanakan untuk apakah FEM atau REM yang cocok sebagai model estimasi, dengan melihat nilai *Cross-Section Random*. Ketika nilai *Prob. Cross-Section Random* < 0.05 maka model terpilih ialah FEM, jika sebaliknya maka REM yang terpilih.

Tabel 4
Hasil Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f | Prob. |
|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Cross-section random | 13.016206 | 4 | 0.0112 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 4 dapat dilihat bahwasanya nilai *Prob. Cross-Section Random* $0.0112 < 0.05$ yang merupakan batas kritis untuk pengujian. Untuk itu, FEM yang terpilih. Maka itu, analisis selanjutnya akan menggunakan FEM sebagai estimasi regresinya.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel diterapkan untuk mengamati korelasi antara variabel eksogen serta variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan yakni 2015-2022.

Tabel 5
Analisis Regresi Data Panel

| Variable | Coefficients | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-----------------|------------|-------------|--------|
| C | 61.74742 | 1.010583 | 61.10080 | 0.0000 |
| X1 | 3.619600 | 1.720000 | 2.104554 | 0.0382 |
| X2 | 2.138877 | 9.160000 | 2.335999 | 0.0218 |
| X3 | 2.183891 | 5.820000 | 3.751515 | 0.0003 |
| X4 | 1.765187 | 7.370000 | 2.395483 | 0.0187 |

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5 di atas menampilkan hasil analisis data regresi data panel. Berdasarkan nilai konstanta (C) serta nilai koefisien dari Tabel 5, maka persamaan regresi data panel dalam artikel ini yakni:

$$Y = 61.74742 + 3.619600X_1 + 2.138877X_2 + 2.183891X_3 + 1.765187X_4$$

Dari persamaan di atas, dapat kita gambarkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (C) ialah 61.74742, menunjukkan bahwa saat variabel eksogen (X) sama dengan nol (0), variabel endogen (Y) akan meningkat sebesar 61.74742
2. Nilai koefisien variabel eksogen (X1) sebesar 3.619600 diartikan bahwa ketika nilai X1 bertambah 1%, akibatnya nilai variabel endogen (Y) akan meningkat sebesar 3.619600. Nilai tersebut bersifat positif yang artinya memiliki pengaruh positif dengan asumsi nilai X1 tetap.
3. Nilai koefisien variabel eksogen (X2) sebesar 2.138877 diartikan bahwa ketika nilai X2 bertambah 1%, akibatnya nilai variabel endogen (Y) akan meningkat sebesar 2.138877. Nilai tersebut bersifat positif yang artinya memiliki pengaruh positif dengan asumsi nilai X1 tetap.
4. Nilai koefisien variabel eksogen (X3) sebesar 2.183891 diartikan bahwa ketika nilai X3 bertambah 1%, akibatnya nilai variabel endogen (Y) akan meningkat sebesar 2.183891. Nilai tersebut bersifat positif yang artinya memiliki pengaruh positif dengan asumsi nilai X1 tetap.
5. Nilai koefisien variabel eksogen (X4) sebesar 1.765187 diartikan bahwa ketika nilai X4 bertambah 1%, akibatnya nilai variabel endogen (Y) akan meningkat sebesar 1.765187. Nilai tersebut bersifat positif yang artinya memiliki pengaruh positif dengan asumsi nilai X1 tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan agar dapat menilai dampak individual dari setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan (2015-2022). Dalam mengukurnya akan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0.05, dengan ketentuan bahwa nilai probabilitas harus kurang dari 0.05. Merujuk pada Tabel 5, diketahui nilai probabilitas variabel X1 ialah 0.0382, X2 ialah 0.0218, X3 ialah 0.0003, dan X4 ialah 0.0187. Karena semua nilai prob. kurang dari 0.05, maka semua hipotesis dalam artikel ini diterima. Artinya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta angkatan kerja mempunyai dampak yang signifikan terhadap IPM di kawasan timur Indonesia (KTI) yakni masing-masing sebesar 3.82% (X1), 2.18% (X2), 0.03% (X3), dan 1.87% (X4) selama 8 tahun pengamatan.

Uji Simultan F (Uji F)

Uji F dilakukan agar dapat menilai secara serempak dampak variabel eksogen terhadap variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan (2015-2022). Dalam mengukurnya akan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0.05, dengan ketentuan bahwa nilai probabilitas harus kurang dari 0.05.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------|
| F-statistic | 98.70190 | Durbin-Watson stat | 1.082845 |
| Prob(F-Statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 6, diketahui F-Statistik adalah 98.70190 serta nilai probabilitas sebesar 0.000000 kurang dari 0.05 yang artinya secara serempak variabel eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Untuk menilai seberapa besar sumbangan variabel eksogen pada variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan (2015-2022). Dapat diketahui melalui nilai R-square pada hasil *output* regresi.

Tabel 7
Hasil Uji R-Square

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>R-Squared</i> | 0.947786 |
| <i>Adjusted R-Squared</i> | 0.938184 |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada Tabel 7 diketahui nilai R-square sebesar 0.947786. Nilai tersebut menampilkan sumbangsih variabel eksogen pada variabel endogen di kawasan timur Indonesia (KTI) ialah sebesar 94.78%. Dengan kata lain, 5.22% variasi IPM di provinsi-provinsi KTI dipengaruhi oleh beberapa aspek yang tidak dipertimbangkan dalam artikel ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merujuk pada hasil uji statistik, ditemukan bahwasanya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif pada IPM di kawasan timur Indonesia (KTI). Peningkatan alokasi dana pemerintah untuk fungsi pendidikan, termasuk di dalamnya belanja pegawai, barang dan jasa, modal, dan biaya pengembangan pendidikan serta program formal dan non-formal, terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM di provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia (KTI).

Kesehatan yang baik merupakan modal utama bagi seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Dalam QS. Al-Maidah ayat 9, Allah SWT memerintahkan untuk selalu memiliki perlindungan bawaan untuk kesehatan dan kebersihan serta perlindungan dari berbagai penyakit, karena kesehatan dipandang sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik (Jajang et al., 2021). Oleh karena itu, investasi pemerintah di sektor pendidikan merupakan tindakan nyata pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Hasbi et al., 2023) serta upaya untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Jajang et al., 2021). Besar kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berdampak pada lamanya sekolah sehingga berdampak pada IPM yang akan meningkat (Nurvita et al., 2022).

Hasil pengamatan ini selaras dengan teori *human capital* yang menyebutkan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja (Grossman, 2000). Peningkatan produktivitas ini kemudian mengarah pada peningkatan pendapatan dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Hasil pengamatan ini didukung oleh penelitian Linhartová (2020) dan Khairina & Wijaya (2023) menemukan investasi pemerintah pada fungsi pendidikan dapat

memberikan kontribusi yang substansial pada pembangunan manusia yang mendorong peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut.

Pengaruh Pengeluaran Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merujuk pada hasil uji statistik, ditemukan bahwasanya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh positif pada IPM di kawasan timur Indonesia (KTI). Peningkatan alokasi dana pemerintah untuk fungsi kesehatan, termasuk di dalamnya belanja pegawai, barang dan jasa, modal, dan biaya penyelenggaraan program kesehatan, terbukti berkontribusi dalam pengembangan kualitas SDM di provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia (KTI).

Pendidikan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam QS. Al'Alaq ayat 1, Allah memerintahkan manusia membaca (mempelajari, meneliti, dan sebagainya) apa saja yang telah diciptakannya (Jajang et al., 2021). Karena pendidikan yang berkualitas akan menciptakan individu yang cerdas, kreatif dan inovatif. Untuk itu, investasi pemerintah pada sektor kesehatan sangat penting terutama bagi masyarakat miskin di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang baik masyarakatnya. Negara bertanggungjawab mewujudkan perbaikan kondisi manusia melalui kesempatan dan sumber daya kesehatan yang lebih berkualitas. Untuk itu, investasi untuk sektor pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi umat (Jajang et al., 2021). Besar kecilnya alokasi dana pemerintah pada sektor kesehatan akan berdampak pada angka harapan hidup sehingga pada gilirannya IPM akan meningkat (Nurvita et al., 2022).

Hasil pengamatan ini selaras dengan teori *human capital* yang menyebutkan bahwa investasi dalam kesehatan meningkatkan kesehatan dan umur panjang individu, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja (Grossman, 2000). Peningkatan produktivitas ini kemudian mengarah pada peningkatan pendapatan dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Hasil pengamatan ini didukung oleh penelitian Fauziana dan Ratnasari (2023) dan Linhartová (2020) menemukan bahwa pengeluaran disektor kesehatan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan manusia di daerah tersebut, alokasi dana untuk sektor kesehatan dapat mendorong peningkatan pada SDM-nya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merujuk pada hasil uji statistik, ditemukan bahwasanya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif pada IPM di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan (2015-2022). Pertumbuhan ekonomi mempunyai efek positif pada IPM dengan cara meningkatkan pendapatan, akses pada layanan publik, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mampu memicu pembangunan infrastruktur, menumbuhkan industri, dan banyaknya fasilitas umum berupa sekolah serta rumah sakit, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM. Dalam Islam pembangunan manusia mencakup semua aspek kehidupan baik dari sisi materi maupun non materi (Jajang et al., 2021). Islam memandang kemajuan ekonomi sebagai penciptaan berkelanjutan dari komponen produksi yang sesuai serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Siregar & Majid, 2023). Ekonomi yang tumbuh diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan saling

membantu Untuk itu, peningkatan pada standar kualifikasi tenaga kerja menjadi penyumbang yang sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi (Nurlina *et al.*, 2023). Hasil pengamatan ini selaras dengan teori *endogenous growth* model yang menyebutkan bahwa modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi, Teori ini menekankan bahwa modal manusia memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun negara. Hasil pengamatan ini didukung Wijaya *et al.* (2021) yang mengungkapkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat di antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Dan diperkuat oleh studi Wahyudi *et.al* (2023) dan Hasbi *et al.* (2023), mereka menemukan bahwa salah satu elemen yang bisa mempengaruhi pencapaian IPM yang lebih tinggi di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merujuk pada hasil uji statistik, ditemukan bahwasanya angkatan kerja memiliki pengaruh positif pada IPM di kawasan timur Indonesia (KTI) selama 8 tahun pengamatan (2015-2022). Ini menandakan bahwasanya semakin banyak populasi di suatu daerah yang siap untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut melalui indeks pembangunan manusia (Fauziana & Ratnasari, 2023).

Keberhasilan pembangunan manusia bergantung pada ketersediaan angkatan kerja (Siregar & Majid, 2023). Angkatan kerja yang sehat dan terampil akan lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang sakit dan tidak memiliki keterampilan (Todaro & Smith, 2015). Daerah dengan angkatan kerja yang besar dan memiliki keterampilan cenderung memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang siap bekerja dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia suatu daerah melalui peningkatan pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian strategi kebijakan yang mendukung pertumbuhan angkatan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja dapat menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pembangunan manusia di daerah tersebut (Jajang *et al.*, 2021). Selain itu, Islam memberikan pandangan menyeluruh di mana pekerjaan di anggap tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi tetapi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Shihab, 2003).

Hasil pengamatan ini selaras dengan teori penawaran dan permintaan. Teori ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dapat dilihat sebagai faktor yang mendorong permintaan tenaga, semakin tinggi IPM, maka semakin banyak individu atau orang yang aktif dalam angkatan kerja serta aktif dalam mencari pekerjaan (Wijaya *et al.*, 2021). Hasil pengamatan ini didukung oleh Wijaya *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya partisipasi yang aktif dari angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi memiliki efek positif pada pencapaian IPM yang tinggi. Hasil studi ini diperkuat oleh studi Fauziana dan Ratnasari (2023) yang menemukan hal serupa, di mana angkatan kerja yang produktif dan terampil berkontribusi secara signifikan pada peningkatan IPM di daerahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta ketersediaan angkatan kerja di

kawasan timur Indonesia (KTI) dari 2015-2022 berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM. Meningkatkan pengeluaran pemerintah KTI untuk pendidikan dan kesehatan akan memperkuat kualitas SDM serta dapat meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, di mana akan menghasilkan lapangan pekerjaan baru, dan akan terjadi peningkatan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM. Angkatan kerja yang terampil juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM. Proses pembangunan manusia tidak dapat diciptakan begitu saja, namun perlu didukung dengan adanya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup atau taraf hidup masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah khususnya di provinsi KTI untuk terus melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan IPM dapat dicapai melalui investasi pada bidang pendidikan maupun kesehatan, serta pembuatan kebijakan dan program yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup penduduknya.

Keterbatasan dalam artikel ini ialah data pengamatan yang masih tergolong sebentar dan sedikit yakni hanya 2015-2022 dan hanya 13 provinsi saja, maka itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun pengamatan serta memanfaatkan metode dan pendekatan lain untuk menghasilkan analisis data yang lebih mendalam dan komprehensif. serta dapat menambahkan variabel yang berpotensi mempengaruhi IPM misalnya kebijakan fiskal, tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, dapat mempertimbangkan menambahkan variabel moderasi untuk memperkuat hubungan variabel eksogen dan endogen dalam artikel ini.

REFERENSI

- Abdeldayem, M. M., Aldulaimi, S., & Kharabsheh, R. (2022). Development of Human Capital Resources to Increasing Economic Growth and Innovation in the GCC Countries. *International Journal of Green Management and Business Studies*, 1(11), 62-79.
- BPS, B. P. S. (2023a). *Booklet Sakernas Agustus 2023*. 6(2).
- BPS, B. P. S. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi*. Badan Pusat Statistik.
- Choudhry, M. T., & Elhorst, P. (2018). Female labour force participation and economic development. *International Journal of Manpower*, 39(7), 896-912. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJM-03-2017-0045>
- Fauziana, H., & Ratnasari, R. T. (2023). The Effect of Health, Education, and Labor Force with Urban Population as Moderating Variables on Human Development Index in Oic Member Countries. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 82-95. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp82-95>
- Grossman, M. (2000). The Human Capital Model. In *Handbook of Health Economics* (Vol. 1, pp. 348-405). Elsevier Science.
- Hasbi, M. Z. N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). Human Development Index from the Islamic Perspective: Roles of Taxation, Zakah, and Health and Education Expenditures. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 57(1), 99-112. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.17576/JEM-2023-5701-08>
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 1158-1166.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218>
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, Al Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Jin, H., & Jakovljevic, M. (2023). Fiscal Decentralization and the Human Development Index: A Cross-Border Empirical Study. *Sustainability (Switzerland)*, 15(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su15118784>
- Khairina, N., & Wijaya, A. (2023). The Determinant of Human Development in the Eastern Part of Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 83–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjie.v12i1.29496>.
- Lange, G.-M., Wodon, Q., & Carey, K. (2018). The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. In *The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1046-6>
- Linhartová, V. (2020). The Effect of Government Expenditure on Human Capital in the Czech Republic. *SciPap (Scientific Papers)*, 28(2), 1056. <https://doi.org/10.46585/sp28021056>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Erlangga.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. J., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisis dengan SPSS - STATA - EViews* (1st ed.). Madenatera.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.10341>.
- Nurlina, Ridha, A., & Asnidar. (2023). Determinants of Human Development Index in Indonesia Period 1990-2021. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7287>. Abstrak
- Nurvita, D., Rohima, S., Bashir, A., & Mardalena. (2022). The Role of Public Spending on Education , Health , and Economic Growth toward Human Development Index in the Local Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business (SIJDEB)*, 6(2), 197–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>
- Raynaldo, R. (2022). Human Development Index And Employment Provision In Medan City. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(6), 1688–1694. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i6.644>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *The Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Lentera Hati.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Editi). Pearson.
- Wahyudi, H., Husain, F. R., & Palupi, W. A. (2023). The Impact of Control of Corruption , Human Development Index , and Macroeconomics on Economic Growth Rates in Low-Middle Income Countries. *WSEAS Transactiton on Business and Economics*, 20,

- 1030–1041. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.94>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonomitrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Wijaya, A., Tasențe, T., Darma, D. C., & Kasuma, J. (2021). Labor Force and Economic Growth Based on Demografic Pressure, Happiness, and Human Development: Empirical From Romania. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 8(1), 40–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v8i1.571>
- World Bank. (2021). The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. In *World Bank*. World Bank.
- Zhang, J., & Danish. (2019). The dynamic linkage between information and communication technology, human development index, and economic growth: evidence from Asian economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(26), 26982–26990. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-05926-0>